PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA TAT TWAM ASI DALAM PENANGANAN MASALAH KELUARGA

Oleh: Riska Siregar / 1101112247
Email: riskasiregar.10@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. H. Yoserizal, MS
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus BinaWidya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi dalam penanganan masalah sosial keluarga di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Ketua LK 3 Tat Twam Asi, Pekerja Sosial di LK3 Tat Twam Asi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik yang digunakan untuk menjelaskan keabsahan data adalah dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh yaitu: peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi dalam penanganan masalah keluarga melalui beberapa tahap yaitu, perekrutan klien yang meliputi klien datang sendiri dan jemput bola, dan penanganan klien yang meliputi konseling, home visit, pemberdayaan serta rujukan. Peran LK3 dalam menangani permasalahan di dalam keluarga ada beberapa macam diantaranya pencegahan, pemberdayaan, perlindungan dan pendampingan klien.

Kata Kunci: Peran Sosial, LK3, Pekanbaru, Riau

**THE ROLE OF THE FAMILY WELFARE CONSULTATION
INSTITUTIONS TAT TWAM ASI IN HANDLING FAMILY PROBLEMS**

**By : Riska Siregar / 1101112247
Email : riskasiregar.10@gmail.com**

**Supervisor: Dr. H. Yoserizal, MS
Department Of Sociology Faculty Of Social And Political Sciences
Riau University
Campus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru- Riau
28293 – Telp /Fax. 0761-63277**

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Family Welfare Consultation Institution Tat Twam Asi in the handling of family social problems in Pekanbaru City. This research uses qualitative approach and with descriptive method. The subject of this research is Chairman of LK 3 Tat Twam Asi, Social Worker in LK3 Tat Twam Asi. The data were collected using observation, interview, and documentation techniques. Techniques used in data analysis are data reduction, data presentation, and conclusion. The technique used to explain the validity of data is by using triangulation of source and triangulation technique.

Based on the research results obtained are: the role of the Family Welfare Consultation Institution Tat Twam Asi in handling family problems through several stages namely, client recruitment that includes clients coming by themselves and picking up the ball, and handling clients that include counseling, home visit, empowerment and referrals. The role of LK3 in handling problems in the family there are several kinds of prevention, empowerment, protection and client assistance.

Keyword : Social Role, LK 3, Pekanbaru, Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak. Hubungan tersebut terjadi dimana antar anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin di dalam keluarga, dalam keadaan yang normal maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari; melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal (Soerjono, 2004: 70-71).

Keluarga sebagai institusi sosial terkecil, merupakan fondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik. Sebab, di dalam keluarga internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial jauh lebih efektif dilakukan daripada melalui institusi lainnya di luar lembaga keluarga. Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak sangat diperlukan terutama pada saat mereka masih berada dibawah usia lima tahun. Seorang bayi yang baru lahir sangat tergantung dengan lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga khususnya orang tua ayah dan ibunya (Diana, 2010: 86). Peran aktif orang tua merupakan sebuah usaha yang secara langsung dalam

memberikan sosialisasi terhadap anak dan juga menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial yang pertama dijumpai oleh anak.

Dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 mendefinisikan bahwa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik serta materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Bertolak belakang dengan gagasan tersebut, tidak semua keluarga mampu untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai anggota keluarga.

Dinas Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, mengklasifikasikan keluarga bermasalah sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi permasalahan tingginya kasus keluarga bermasalah salah satunya adalah dengan membentuk badan-badan yang secara khusus bertujuan untuk meminimalisir bahkan mengatasi permasalahan tersebut.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang

menjadi urusan Dinas Sosial Provinsi Riau dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial. Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peran untuk melaksanakan urusan bidang sosial dan memiliki tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

LK3 merupakan lembaga yang secara terpadu bernaung dibawah Dinas Sosial yang terdiri atas LK3 dengan basis Kabupaten/kota, LK3 berbasis masyarakat dan LK3 berbasis perguruan tinggi. LK3 berbasis kota merupakan LK3 yang secara khusus menangani masalah psikososial individu, keluarga maupun masyarakat dalam lingkup hanya satu kabupaten/kota saja, sedangkan LK3 berbasis masyarakat cenderung dikelola untuk melayani masalah psikososial di lingkup yang lebih luas yaitu tingkat provinsi, sedangkan LK3 berbasis perguruan tinggi merupakan LK3 yang bersifat umum yang dimiliki suatu perguruan tinggi untuk melayani masyarakat secara umum dan sebagai media belajar bagi mahasiswa secara khusus.

LK3 membantu peran pemerintah dengan memberikan layanan konsultasi dan pembinaan bagi yang bermasalah dengan melakukan pendekatan awal, asesmen masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah,

pemecahan masalah, terminasi hingga bimbingan lanjutan. Para pekerja di lembaga ini termasuk ke dalam pekerja sosial dan para konsultan dengan jejaring kemitraan yang akan dipertimbangkan sebagai bahan rujukan dalam mengatasi permasalahan. Pekerja sosial yang bergabung ke dalam LK3 tergabung dari berbagai profesi yaitu Psikolog, Dokter, Polisi dan lain sebagainya.

Budaya masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan yang dihadapinya menjadi salah satu kendala. Sosialisasi yang dilakukan hingga sekarangpun belum menjangkau seluruh masyarakat, hingga program layanan yang diberikan lembaga belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul *“Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tat Twam Asi dalam Penanganan Masalah Keluarga “*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dalam latar diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi dalam penanganan masalah sosial keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi dalam penanganan masalah sosial keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu sosiologi.
2. Memberikan gambaran serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dalam Menangani Masalah Sosial Keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang LK 3

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan sosial kepada individu, anggota keluarga, masyarakat yang menghadapi gangguan terhadap fungsinya. Sebagai suatu lembaga, LK3 memberikan layanan yang berupa konsultasi kesejahteraan keluarga.

Permensos No 16 tahun 2003 menjelaskan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut (LK3) adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Sebagai unit pelayanan sosial terpadu, LK3 juga dapat disebut sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Unit pelayanan sosial terpadu merupakan seperangkat pelayanan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga yang bermasalah psikososial. Sedangkan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk

oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Adapun tujuan, fungsi dan sasaran LK3 adalah sebagai berikut :

- Tujuan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) :

- 1) Mengatasi masalah psikososial keluarga, yaitu dengan melakukan tindakan deteksi dan antisipasi terhadap keluarga yang diindikasikan mengalami resiko dan ancaman masalah atau gangguan relasi di dalam keluarga.

- 2) Memulihkan kondisi psikososial keluarga, dengan melakukan dukungan terhadap keluarga dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah psikososial yang dihadapi keluarga.

- 3) Memperkuat ketahanan keluarga yaitu dengan upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik ekonomi, pendidikan, akhlak/agama, relasi sosial anggota keluarga sehingga memiliki kekuatan mengatasi dan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang dihadapi.

- Fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) :

- 1) Pencegahan, menghindari terjadinya, berkembangnya dan terjadinya kembali masalah yang dialami oleh anggota keluarga.

- 2) Pengembangan, meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah dan

- peningkatan taraf kehidupan keluarga.
 - 3) Rehabilitasi, memilihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga.
 - 4) Perlindungan, mempertahankan, memperbaiki, mningkatkan kualitas kondisi yang sudah ada, sehingga tidak terjadi penurunan yang berdampak pada tumbuh berkembangnya masalah.
 - 5) Penunjang, mendukung upaya yang dilakukan lembaga lain dalam rangka tercapainya peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
- Sasaran utama LK3 ditujukan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial.
 - 1) Keluarga yang membutuhkan bantuan karena masalah yang dialaminya.
 - 2) Keluarga yang membutuhkan informasi untuk mengatasi masalah, atau untuk meningkatkan taraf hidupnya.
 - 3) Keluarga, kelompok, instansi, organisasai yang membutuhkan informasi karena kepedulian, kepentingan atau tugasnya untuk mengatasi masalah sosial keluarga.
- Program pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) :
 - 1) Konsultasi
 - 2) Konseling
 - 3) Informasi
 - 4) Perlindungan
 - 5) Pendampingan
 - 6) Rujukan
 - 7) Penjaringan
 - 8) Jejaring,

- 9) Penjangkauan
- Landasan hukum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - 1) Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Kesejahteraan Keluarga

2.2 Kajian Peran Pekerja Sosial

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004: 243).

Peran berarti laku, bertindak. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (Harahap, 2007: 854). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan, dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui dua cara, yaitu penjelasan historis dan pengertian peran menurut ilmu sosial.

Konsep tentang peran itu sendiri menurut Komarudin dalam R.B Sihombing (2008: 1) sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian dari fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Menurut Sheafor dan Horejsi dalam Edi Suharto (2011), peranan pekerja sosial antara lain sebagai pendamping, fasilitator, konsultan, pelindung, dan lain-lain.

2.3 Kajian Pemberdayaan

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), secara konseptual berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Sementara itu menurut Kindervatter dalam Malik dan Siti Irene (2014: 132), pemberdayaan diartikan sebagai seseorang memperoleh pemahaman dan pengendalian kekuatan sosial, ekonomi, dan/ atau politik untuk memperbaiki keberadaannya dalam masyarakat.

2.3.1 Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang.

- 1) Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti

lepas dari tanggungjawab negara.

- 2) Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Manusia sebagai subjek pembangunan berarti menempatkan manusia sebagai dasar, pelaku, dan tujuan pembangunan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang amat berharga, bermartabat luhur, sehingga ia tak dapat dikorbankan oleh apapun dan siapapun demi tujuan diluar diri manusia itu. Inti dari uraian tersebut adalah dimana posisi masyarakat sebagai partisipan/subyek pemberdayaan bukan sebagai objek pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan (Cholisin: 2011).

Menurut Rauf A. Hatu (2010), tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat dan kelompok lemah lainnya. Mereka adalah kelompok yang pada umumnya kurang memiliki keberdayaan. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya.

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis;
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing;
- 3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Sementara itu menurut Suhartini (2005), tujuan pemberdayaan meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui suatu upaya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
- 2) Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya
- 3) Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat

menunjang perekonomian keluarga/warga.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang masalah dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam terhadap objek penelitian kualitatif (Moleong, 2002:5). Sejalan dengan penjelasan di atas tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penulis melihat pada dasarnya interaksi yang terjalin antar individu atau kelompok dengan dunia sosial dan lingkungnya saling mempengaruhi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di unit Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi yang berada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena LK 3 Tat Twam Asi adalah LK 3 yang masih aktif dan merupakan salah satu LK 3 di tingkat Provinsi yang berbasis masyarakat, serta di unit LK3 Tat Twam Asi memiliki jumlah klien terbanyak.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Subjek penelitian

Penentuan subyek penelitian dilaksanakan dengan teknik pengambilan sampel secara bertujuan (purposive sampling). Menurut Sugiyono (2010 : 300) purposive

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menentukan secara mandiri subyek penelitian yang akan digunakan untuk mencari informasi yang terkait dengan penelitian.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari responden yang berguna menjawab permasalahan yang ada. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang terdiri identitas subjek, data permasalahan sosial dalam keluarga di kota Pekanbaru, dan data yang berkaitan dengan permasalahan tentang Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam Penanganan Masalah Sosial Keluarga.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku referensi, buku-buku dari perpustakaan, internet dan berbagai dokumen yang terkait dengan pembahasan mengenai Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam Penanganan Masalah Sosial Keluarga

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Observation)

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi

verbal atau percakapan dengan maksud memperoleh informasi dari objek. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexi J. Melong, 2006:186).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terdiri dari berbagai sumber yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah selanjutnya mengkatagorikan data tersebut dengan tujuan untuk mempermudah dalam menjelaskan dan mendapat gambaran yang jelas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Tingkat II Kampar. Pada tanggal 7 september 1987, terdiri dari delapan wilayah kecamatan dari lima Kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km², setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya diverifikasi menjadi 632,26 Km².

4.1.1 Kondisi Demografi Pekanbaru

Kondisi Demografi Pekanbaru Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mencapai 1.038.118 jiwa pada tahun 2015. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,63 persen dari tahun 2010.

Kepadatan penduduknya mencapai 1.642 jiwa/km², dengan kecamatan terpadat adalah Sukajadi sebesar 13.205 jiwa/km².

4.1.2 Kondisi topografi

Secara umum kondisi wilayah Kota Pekanbaru sebagian besar arealnya mempunyai kelas lereng datar dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2 kelas kemiringan lereng. Yaitu kemiringan lerengnya 0 – 2% dengan luas 27.818 Ha dan sekitar 10.806 Ha kemiringan lereng 2 – 8% yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota. Kemiringan 0 – 2% ini terletak di daerah bagian selatan, sedangkan kemiringan lereng 2 – 8% terletak menyebar di bagian tenggara Kota Pekanbaru dan sebagian lagi di daerah Utara.

4.1.3 Pendidikan

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih di dominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%.

4.1.4 Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta

pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

4.1 Profil Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tat Twam Asi

4.2.1 Sejarah Singkat LK3 Tat Twam Asi

Lahir dan tumbuhnya Yayasan Tat Twam Asi Riau sejak tanggal 20 Desember 1983 dan LK 3 Tat Twam Asi berdiri pada Januari 2011 yang berkedudukan di ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru, dengan fungsi adalah membantu pemerintah dalam upaya terwujudnya dan meningkatnya kesejahteraan sosial di provinsi riau secara umum oleh para pelaku kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial psikologis keluarga di Provinsi Riau cenderung meningkat baik disebabkan faktor internal eksternal keluarga: kenakalan anak dalam keluarga, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, NAPZA, kriminalitas lainnya.

Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Tat Twam Asi Provinsi Riau berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 239. Permasalahan keluarga di Provinsi

Riau pada saat ini sangatlah beragam mulai dari kesulitan ekonomi, keretakan rumah tangga, masalah anak putus sekolah maupun penelantaran keluarga. Dalam hal ini LK 3 Tat Twam Asi Provinsi Riau terus berusaha untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan berusaha bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam menangani permasalahan tersebut diatas.

4.2.2 Dasar, Maksud dan Tujuan

Dasar Hukum Pelaksanaan LK 3 Tat Twam Asi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Menteri Sosial RI nomor 16 tahun 2013 tanggal 11 desember 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
3. Surat keputusan ketua yayasan TAT Twam Asi provinsi riau nomor : KPTS 01 /YTTA/I/2015. Tanggal 5 Januari 2015 tentang susunan pengurus LK3 Tat Twam Asi Provinsi Riau tahun 2015.

4.2.3 Maksud Dan Tujuan

1. Membantu pemerintah provinsi riau dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan tanggung jawab keluarga.
2. Membantu pemerintah dalam mengusahakan,

mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan dibidang kesejahteraan sosial, kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dalam suasana kekeluargaan.

4.2.4 Program Layanan di LK3 Tat Twam Asi

Program layanan yang ada di LK3 Tat Twam Asi adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Konseling
Pelayanan konseling di LK3 yang memberikan layanan konsultasi kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang memerlukan bantuan. Selama kegiatan ini klien tidak dipungut biaya (Gratis).
2. Pelayanan Advokasi dan pendampingan
Pelayanan advokasi dan pendampingan adalah program yang memberikan layanan kepada klien yang mengikuti kegiatan dari LK3 tetapi klien masih belum bisa memecahkan permasalahannya sendiri.
3. Pelayanan Rujukan
Pelayanan rujukan merupakan salah satu pelayanan yang diberikan apabila dari pihak LK3 tidak bisa menyelesaikan permasalahan klien, dengan kata lain perlu ada pihak lain yang

lebih berkompeten untuk menyelesaikan.

4. Pelayanan Sosialisasi dan Informasi

Pelayanan ini merupakan bentuk promosi dari LK3 Tat Twam Asi untuk memberitahu informasi tentang keberadaan LK3 kepada masyarakat umum. Biasanya pelayanan ini diadakan melalui penyuluhan-penyuluhan.

5. Pelayanan Penguatan Ekonomi Keluarga

Pelayanan penguatan ekonomi keluarga diberikan kepada keluarga-keluarga yang pernah menjadi klien di LK3 Teratai yang masih kurang mampu.

BAB V

PERAN LK 3 TAT TWAM ASI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN SOSIAL KELUARGA

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas

arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa pelaksanaan yang ada di LK3 Tat Twam Asi sesuai dengan hasil studi dokumentasi yang diperoleh peneliti, sebagai berikut :

5.1 Proses Perekrutan Klien

Klien yang datang ke LK3 merupakan individu, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah psikososial. Bagi LK3 merekrut klien bukan hal yang dipentingkan, membantu siapapun dan dari latar belakang apapun klien yang datang adalah fokus utama yang dilakukan oleh LK3. Dalam perekrutan klien yang dilakukan LK3 yaitu dengan secara langsung dan sukarela mendatangi LK3 yang terdekat/ tersedia di lokasi tempat tinggalnya, atau melakukan kontak awal dengan LK 3 berdasarkan rujukan dari petugas TKSK / atau kader-kader dibidang pelayanan kesejahteraan sosial setempat, maupun melalui kontak telepon/ call center yang tersedia dan juga dengan model jemput bola.

5.2 Peran LK3

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran LK3 dalam menangani permasalahan di dalam keluarga ada beberapa macam diantaranya pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi,

perlindungan dan pendampingan klien.

5.2.1 Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Fungsi pencegahan, mencegah mengurangi dan menekan masalah sosial keluarga agar tidak mengalami masalah sosial psikologi.

Konsultasi, yaitu memberikan konsultasi kepada masyarakat, organisasi, kelompok, maupun individu yang mempunyai masalah. Pengertian Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsultee (keluarga atau individu) dalam hubungannya menyelesaikan masalah. Konsultasi memberikan bantuan penasehatan kepada keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kualifikasi profesional yang memadai.

5.2.3 Pemberdayaan

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang *Kader Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 ayat 8* menjelaskan : Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5.3 Perlindungan Sosial

Perlindungan biasanya dilakukan oleh bidang aparat, tetapi profesi pekerja sosial dapat mengambil peran seperti melindungi klien.

Korban merasa nyaman untuk mengutarakan permasalahannya, bebas dalam pikiran, dan merasa bahwa masalahnya dirahasiakan oleh pekerja sosial.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi dalam perekrutan klien biasanya klien ada yang datang secara langsung dengan sendirinya, atau dirujuk dari pihak lain seperti melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, atau kader-kader dibidang pelayanan kesejahteraan sosial setempat, selain itu juga LK3 melalui pekerja sosial akan melakukan sistem jemput bola dimana pekerja-pekerja sosial akan turun langsung menangani masyarakat yang bermasalah.

Peran LK3 di antaranya yaitu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, memberikan konsultasi, konseling, perlindungan sosial serta penyelesaian masalah di dalam keluarga. Sehingga dengan pelayanan yang di berikan sangat membantu dan meringankan permasalahan yang terjadi di dalam suatu keluarga.

6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pengurus LK3 Tat Twam Asi, supaya LK3 yang ada di Pekanbaru lebih di kembangkan lagi terkhusus dalam sosialisasi tentang LK3 ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan dari LK3 Tat Twam Asi ini.

2. Bagi Pemerintah Provinsi, supaya pemerintah lebih memperhatikan setiap lembaga-lembaga dalam penanganan permasalahan yang ada di dalam suatu keluarga, khususnya mengenai anggaran dana yang diperlukan untuk menunjang program kerja LK 3, yang hingga kini belum tersedia, agar dapat memberikan kesejahteraan di suatu masyarakat.
3. Bagi masyarakat, supaya lebih berperan aktif dan terbuka mendukung setiap program yang di adakan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dengan demikian agar mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga.
4. Bagi masyarakat juga supaya mensosialisasikan permasalahannya sehingga mempermudah kinerja instansi terkait dan mengurangi dampak yang berkepanjangan.
5. Bagi para pembaca agar penelitian ini dapat di jadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. (2003). *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bagong Suyanto & Sutinah. (2011) *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Diana Mutiah. 2010. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- E. St Harahap, dkk.(2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Gibson, Robert L., Mitchell, Marianne H. 2011. *Bimbingan dan Konseling Edisi Ke Tujuh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Jeanette Murad Lesmana. (2005). *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: UI.
- Gladding, Samuel. 2012. *Konseling, Profesi Yang Menyeluruh (Edisi Keenam)*, Jakarta : PT Indeks.
- Iskandar, J. (1993). *Beberapa Keahlian Penting Dalam Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS.
- Malik A. dan Dwiningrum, S.I.A. (2014). *Keberhasilan Program Desa Vokasi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gemawang Kabupaten Semarang. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 1 Nomor 2. Halaman 13
- Miradj, S. dan Sumarno. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 1 Nomor 1. Halaman 106.

- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosda Karya.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Rauf, A.H. (2010). *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat*. Volume 7, Nomor 4, (Desember 2010). 240-253
- Rustanto, B. (2014). *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- R.B Sihombing. (2008). Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Penjualan Perusahaan.
- Sihombing, U. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi*. Jakarta: PD. Mahkota
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2011). *Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial Di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sunyoto, U. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutoro, E. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim. Samarinda, Desember 2002
- Soerjono, Soekanto. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibhawa, B. dkk. (2010). *Dasar-Dasar Pekerja Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Skripsi

- Fitriyah. (2011). *Peran Pekerja Sosial Terhadap Pendidikan Anak-anak Terlantar*. Skripsi: Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dewi Putri Anggi. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tahun 2013-2014*. Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau).
- Septiani Putri Winata (2018). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2016*. Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau.